

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan tumpuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan Negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan perkembangan Perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan Negara (*Budgeter*) yang digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Selain itu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Aristanti, 2013:3).

Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis ungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah.

Salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah Pajak Parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat

parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berbeda dengan Retribusi Parkir yang dikenakan kepada pemakai jika memanfaatkan sebagian dari badan jalan yang merupakan fasilitas milik Negara, Pajak Parkir dikenakan terhadap pemilik perorangan atau badan swasta yang memiliki lahan parkir diluar tanah milik Negara. Dipilihnya Pajak Parkir sebagai objek penelitian karena sebagai salah satu jenis pajak parkir sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya seperti pajak BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain.

Dinas Pelayanan Pajak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan pajak dituntut untuk selalu dapat memenuhi target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan target ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan oleh pemerintah.

Namun Pada kenyataannya, objek pajak parkir yang diharapkan mempunyai potensi untuk menambah pendapatan asli daerah justru tidak mencapai target. Terbukti pada target PAD tahun 2013 sebesar Rp 1,056 triliun, baru terrealisasi sebesar Rp 599,66 miliar, atau 56%. PAD kota Bandung diperoleh dari 9 jenis pajak daerah.yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak reklame, Pajak air tanah, Pajak Bumi bangunan (PBB), dan Pajak bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB).

Sembilan jenis pajak yang dikelola adalah Berikut data target dan realisasi Kota Bandung per 1 agustus 2013 :

1. Pajak BPHTB: dari target Rp 350 miliar, realisasi Rp 232,14 miliar.
2. Pajak hotel: dari target Rp 145 miliar, realisasi Rp 102,6 miliar.
3. Pajak restoran: dari target Rp 99 miliar, realisasi Rp 65,13 miliar.
4. Pajak hiburan: dari target Rp 35 miliar, realisasi Rp 23,38 miliar.
5. Pajak penerangan jalan: dari target Rp 120 miliar, realisasi Rp 75,37 miliar.
6. Pajak parkir: dari target Rp 7,5 miliar, realisasi Rp 4,4 miliar.
7. Pajak reklame: dari target Rp 18,5 miliar, realisasi Rp 10,6 miliar.
8. Pajak air tanah: dari target Rp 6 miliar, realisasi Rp 2,02 miliar.
9. Pajak PBB: dari target Rp 275 miliar, realisasi Rp 83,89 miliar.

Bisa dilihat dari data tersebut ada 4 jenis pajak yang tingkat pencapaiannya masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, salah satunya adalah pajak parkir yang baru mencapai Rp 4,4 miliar dari target Rp 7,5 miliar. (Berita harian online Tribun.com pada 13 agustus 2013).

Selain itu yang dapat merugikan pemerintah daerah yaitu terdapatnya pengelolaan parkir *off street* yang seringkali menaikkan tarif parkir secara sepihak, persoalan ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal. (Berita harian online VIVANews pada 2 januari 2012).

Beberapa fenomena secara umum di atas menunjukkan bahwa masih banyak sekali potensi pajak parkir yang belum terrealisasikan dan kesadaran wajib

pajak yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal.

Penelitian ini merupakan hasil dari replikasi dari penelitian yang dilakukan Hendra Permana pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Wilayah IV Priangan”. Lokasi penelitian ini pada Dinas Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Wilayah IV Priangan. Variabel yang diteliti adalah pengendalian intern dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah. Populasi penelitian adalah Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan dalam hal ini 10 Dinas Pendapatan Daerah, pengambilan sampel di lakukan dengan metode sampling jenuh.

Adapun pengembangan yang dilakukan terhadap peneliti terdahulu yaitu : Penelitian Hendra Permana dilakukan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu selama 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan penulis sekarang yaitu Penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yaitu selama 5 (lima) tahun, penelitian dilakukan hanya di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan adanya perbedaan indikator variabel x dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan kedalam skripsi dengan Judul :
“PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR (Suatu Studi Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir telah tercapai di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu ekonomi akuntansi dengan perpajakan, khususnya mengenai sistem pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengendalian intern yang diterapkan di bidang pemerintahan daerah dan peranannya dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di Kota Bandung.

2. Intansi (Dinas Palayanan Pajak Kota Bandung)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengendalian intern di masa yang akan datang.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang pemerintahan daerah khususnya pengendalian intern dan pajak parkir.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Palayanan Pajak Kota Bandung dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 yang berlokasi di Jalan Wastukencana No.2 Bandung.